

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan Kerja

Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2009 – 2013 beserta target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya yang dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan baik yang dibiayai oleh APBN/BLN, APBD I dan APBD II, dimana dari tahun ketahun mengalami peningkatan anggaran yang cukup berarti untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut . Pada tahun 2013, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

- Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat
- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Kegiatan rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
 - Kegiatan pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :
- Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari :
- Kegiatan pengadaan pakaian KORPRI
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
 - Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari :
- Kegiatan peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- Kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan
 - Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

- g. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan
 - Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan
 - Kegiatan pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian / perkebunan
- h. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah
 - Kegiatan Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat
- i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, terdiri dari :
 - Kegiatan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
 - Kegiatan pemberdayaan dan penumbuhan kelembagaan petani perkebunan
- j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
 - Kegiatan uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pilihan dimana penilaian akan Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada pencapaian kinerja program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja program dan kegiatan berdasarkan evaluasi rencana kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja
Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
Kegiatan penyusunan data base potensi produksi pangan	Terlaksananya pertemuan penyusunan statistik perkebunan angka tetap tahun 2012 dan angka sementara tahun 2013	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya rapat koordinasi perkebunan se Kalimantan Timur serta evaluasi kegiatan	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota
Kegiatan Pengembangan perbenihan / pembibitan	Terlaksananya pengawasan peredaran benih perkebunan	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota
Kegiatan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Terlaksananya peningkatan SDM perlindungan perkebunan bagi petani dan petugas	14 Kabupaten/Kota 350 petani	14 Kabupaten/Kota 350 petani
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			
Kegiatan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan monitoring kegiatan usaha perkebunan, promosi investasi perkebunan	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota
Kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Terlaksananya promosi investasi perkebunan	4 event	4 event
Kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya informasi pasar ke kabupaten/kota	10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan			
Kegiatan identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfeh	Peningkatan produksi perkebunan	14 Kabupaten/Kota	14 Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat	Perluasan areal tanaman :		
	a. Kelapa Sawit	1.065 Ha	1.065 Ha
	b. Karet	1.130 Ha	1.130 Ha
	c. Kakao	350 Ha	350 Ha
	d. Kelapa Dalam		
	e. Lada		
	Pemeliharaan tanaman kelapa sawit		
	Pemeliharaan tanaman karet		
	Pemeliharaan tanaman kakao	200 Ha	200 Ha
	Pemeliharaan tanaman lada	100 Ha	100 Ha
	Rehabilitasi kelapa	85 Ha	85 Ha
	Pemeliharaan aneka komoditi perkebunan	2.125 Ha	2.125 Ha
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan			
Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya bimbingan & pembinaan Terhadap Petani & Kelompok Tani (Kelembagaan Petani)	13 Kabupaten/Kota	13 Kabupaten/Kota
Kegiatan Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	Meningkatkan sistem kelembagaan petani perkebunan	35 orang	35 orang
Program Peningkatan Penerapan Teknologi/Perkebunan			
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya Kebutuhan Bahan Tanaman Perkebunan	3 Komoditi	3 Komoditi
Kegiatan Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya pengujian, pengemangan bahan pengendali penyakit, hama dan patogen dan pelatihan pengendalian opt perkebunan di Kab/Kota se Kaltim	10 Kabupaten	10 Kabupaten
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	100 %	100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	100 %

Selain itu, dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2009-2013, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Agenda II yaitu Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Pro Rakyat yang bertujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Ekonomi Yang Handal Berbasis Agribisnis dan Ekowisata dengan sasaran terwujudnya lahan perkebunan terdiri dari 1.000.000 ha kelapa, 250.000 komoditas kelapa dalam, karet, kakao, lada dan aneka tanaman perkebunan serta meningkatnya produksi komoditas perkebunan sebesar 4.685.454 ton yang didominasi oleh Kelapa Sawit sebesar 4.500.000 ton. Adapun capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 7 Capaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sub Sektor Perkebunan

Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2013		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya produksi komoditas perkebunan dan luasan lahan perkebunan	1. Produksi Perkebunan (ton)				
	- Kelapa Sawit	Ton	4.500.000	6.538.743	145,31
	- Aneka Komoditi Lainnya	Ton	185.454	73.142	39,44
	2. Peningkatan perluasan areal perkebunan				
	- Kelapa Sawit	Ha	1.000.000	1.002.294	100,23
	- Aneka Komoditi Lainnya	Ha	250.000	142.841	57,14

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian untuk Produksi Perkebunan pada tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) pada tahun 2009 sebesar 2.298.186 Ton, sedangkan tahun 2013 produksi kelapa sawit naik menjadi 6.538.743 ton atau mengalami kenaikan produksi sebesar 4.240.557 (184,51 %) dari tahun 2009. Jika di rata-ratakan per tahunnya mengalami pertumbuhan produksi sebesar 30,39 %. Jika perbandingan berdasarkan realisasi tahun 2012, maka produksi kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 804.279 ton atau 14,02 %.

Faktor penyebab meningkatnya rata-rata produksi per tahun kelapa sawit adalah adanya pertambahan pengembangan perluasan areal yang mengakibatkan meningkatnya indeks pertambahan produksi terutama pada perluasan lahan yang memasuki tahapan Tanaman Menghasilkan (TM) sebanding dengan pertumbuhan perluasan areal tersebut.

Sedangkan Produksi aneka komoditi lainnya (Karet, Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Aren, Kemiri, Jambu Mete dan Cengkeh) pada tahun 2009 realisasi capaian 120.220 ton atau sebesar 87,76 % dari target di RPJMD yaitu sebesar 136.985 ton, sedangkan di tahun 2013 realisasi produksi sebesar 73.142 ton atau 39,44 % dari target RPJMD yaitu sebesar 185.454, atau mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 47.078 ton dan jika di rata-ratakan per tahun mengalami penurunan 8,39 %. Jika perbandingan berdasarkan realisasi tahun 2012 maka mengalami penurunan 63.409 ton atau 46,43 %. Faktor utama dari penurunan produksi ini adalah banyaknya Tanaman Tua yang umur produksinya tidak optimal lagi selain itu tidak ada penambahan tanaman menghasilkan yang disebabkan oleh pekebun lebih cenderung kepada komoditi kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan atau pun adanya ketertarikan pada sektor lain seperti pertanian ataupun tambang. Upaya untuk mempertahankan capaian produksi tersebut telah ditempuh berbagai program dan kegiatan seperti Pembinaan, Fasilitasi dan Pendampingan Kelompok Sasaran serta penerapan sistem budidaya sesuai anjuran (GAP) seperti penggunaan klon-klon anjuran/bibit unggul. Untuk komoditi kakao Program nasional telah diluncurkan melalui program Gerakan Nasional (Gernas) peningkatan mutu dan produktivitas komoditi kakao melalui kegiatan intensifikasi rehabilitasi dan peremajaan pada sentra-sentra pengembangan komoditi kakao terutama di daerah / Kabupaten perbatasan. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pun telah melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan aneka tanaman perkebunan lainnya yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman tersebut dan membantu pekebun dalam pengurangan biaya operasional. Selain itu, sering diadakan pendampingan terhadap kelompok tani untuk meningkatkan kesadaran pekebun terhadap aneka tanaman perkebunan lainnya.

Untuk target perluasan areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Program Pengembangan Sejuta Hektar Kelapa Sawit. Pada Tahun 2009 luas Kelapa Sawit 530.554 Ha dan pada tahun 2013 perluasan naik menjadi 1.002.294 Ha atau mengalami kenaikan penambahan luas 471.740 Ha (88,91 %). Sehingga dapat dikatakan bahwa program pengembangan sejuta hektar kelapa sawit di Kalimantan Timur telah melebihi target RPJMD. Pengembangan komoditi Kelapa Sawit mengalami pertumbuhan pesat karena adanya dukungan pemerintah dan masyarakat luas, komitmen pemerintah dan investor perkebunan yang mempunyai keseriusan membangun perkebunan dan pemberian insentif perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun untuk pengembangan perkebunan aneka komoditi lainnya mengalami penurunan luasan. Pada Tahun 2009 luas aneka komoditi lainnya 181.612 Ha dan pada tahun 2013 perluasan turun menjadi 142.841 Ha atau mengalami penurunan luasan 38.771 Ha (-21,34 %). Jika perbandingan berdasarkan realisasi tahun 2012 maka mengalami penurunan 26.786 ha atau -15,79 % Faktor penyebab penurunan luas areal aneka komoditi lainnya adalah adanya okupasi lahan oleh aktivitas sektor lain di luar pertanian dan terjadinya konversi tanaman ke komoditi kelapa sawit. Salah satu upaya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendorong perluasan areal aneka komoditi lainnya adalah menganggarkan kegiatan pembukaan lahan pola perkebunan inti rakyat dengan memberikan bantuan berupa bibit, pupuk dan herbisida kepada pekebun.

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2013, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 55.707.717.600,- dan realisasi hingga akhir 2013 adalah sebesar Rp. 50.533.252.096,- atau 90,71 %, sebagaimana tertera di tabel berikut ini :

Tabel 8. Rincian APBD dan Realisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi		
		Fisik (%)	Keuangan (Rp)	% Capaian
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur				
Belanja Tidak Langsung	9.870.358.000	100	8.998.507.064	91,17
Belanja Langsung				
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.983.850.000	100	1.698.726.170	85,63
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1.620.916.500	100	1.595.102.450	98,41
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.800.000	100	38.025.000	81,25
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	279.650.000	100	228.758.250	81,80
5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	442.800.000	100	428.400.000	96,75
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
a. Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	2.277.492.000	100	1.703.976.009	74,82
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	903.000.000	100	645.732.100	71,51
c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	2.013.074.500	100	1.846.656.774	91,73
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
a. Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.102.500.000	100	969.638.860	87,95
b. Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	500.250.000	100	452.502.450	90,46
c. Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	443.100.000	100	418.920.000	94,54
8. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
a. Identifikasi Blok Penghasil Tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RDKK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	2.058.425.000	100	1.963.172.743	95,37
b. Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	22.984.243.100	95,73	21.246.437.400	92,44
9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan				
a. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	478.958.500	100	361.680.000	75,51
b. Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	466.000.000	68,73	241.324.630	51,79

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan				
Belanja Tidak Langsung	710.100.000	100	671.240.000	94,53
Belanja Langsung				
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.400.000	100	264.417.511	90,43
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	52.200.000	100	51.935.450	99,49
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.400.000	100	20.400.000	100
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	54.700.000	100	52.814.600	96,55
5. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	106.200.000	100	106.200.000	100
6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
a. Pengembangan Perbenihan / Pembibitan	932.100.000	100	899.673.069	96,52
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				
Belanja Tidak Langsung	729.900.000	100	621.110.000	85,45
Belanja Langsung				
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	473.000.000	100	421.755.338	89,17
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	36.000.000	100	35.929.200	99,80
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	100	48.581.000	97,16
4. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000	100	116.200.000	99,32
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
a. Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama dan Patogen pada Tanaman Perkebunan	1.747.000.000	100	1.697.519.650	97,17
UPTD Teknologi Terapan Perkebunan				
Belanja Tidak Langsung	531.300.000	100	456.255.000	85,88
Belanja Langsung				
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.050.000	100	449.694.878	88,34
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	190.950.000	100	185.432.000	97,11
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	100	69.950.000	99,93
4. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	117.000.000	100	106.200.000	90,77
5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan	1.500.000.000	100	1.420.384.500	94,69
T O T A L	55.707.717.600	97,59	50.533.252.096	90,71

4. Perencanaan Pembangunan

Secara keseluruhan sasaran yang ingin dicapai adalah untuk mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi yang handal berbasis agribisnis dan ekowisata serta menciptakan alam yang lestari melalui penegakan aturan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan sasaran pembangunan meliputi :

1. Mewujudkan lahan perkebunan yang terdiri dari :
 - a. 1.000.000 Ha lahan Kelapa Sawit ;
 - b. 250.000 Ha yang meliputi komoditi Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Lada dan aneka tanaman perkebunan.
2. Meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha industri dan aparatur pembina, pengembangan pendidikan formal maupun melalui diklat-diklat jangka pendek dan menengah.
3. Menciptakan iklim investasi baru untuk mengembangkan industri turunan/industri hilir yang bahan bakunya telah tersedia seperti CPO dan lain-lain.
4. Pengembangan Perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomis tinggi
5. Peningkatan mutu dan kualitas serta pemasaran hasil produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pencapaian kinerja setiap instansi. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Peralatan dan Mesin, Jalan Irigasi dan Pengairan, serta sarana dan prasarana lainnya. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam Buku Inventaris Barang dan dalam neraca Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, sarana dan prasarana termasuk dalam kategori aset tetap.

6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet pola PIR Swadaya di wilayah Kalimantan Timur tahun 2013 mengalami berbagai kendala, hambatan dan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan bibit di lapangan dan perlunya optimalisasi penangkar-penangkar bibit lokal.
2. Kemampuan teknis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
3. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
4. Para Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) PIR Swadaya belum secara intensif melakukan sinkronisasi data dan memberikan pemahaman yang memadai kepada petani/pekebun tentang perkebunan PIR Swadaya serta tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program tersebut.
5. Dalam distribusi bantuan kepada petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Masih beredarnya bibit sawit palsu (tidak bersertifikat) di perkebunan rakyat yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani pekebun terhadap bibit sawit palsu

Upaya Penyelesaian Masalah

1. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar- penangkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapkan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar-penangkar tersebut serta perlunya

perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuaikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.

2. Petugas Perkebunan intensif melakukan pendampingan, pengawasan kepada petani dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan pada tingkat lapang dan kelompok tani di lapangan serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
3. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
4. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan teknis PIR Swadaya.
5. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)
6. Mensosialisasikan kepada petani pekebun perbedaan antara bibit sawit asli dan bibit sawit palsu, sehingga petani pekebun memiliki pengetahuan yang memadai dan dapat memilih benih sawit dengan benar dan tepat sasaran.